



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### SIMPULAN dan SARAN

#### 5.1 Simpulan

Perkawinan anak adalah Culture Wars atas definisi anak perempuan – telah menstruasi versus 18 tahun ke atas, – orientasi atau kepuasan hidup – area publik atau karier versus area domestik atau rumah tangga, – serta pemilik tubuh perempuan – otonomi individual versus kolektif. Analisis atas artikel-artikel Magdalene tentang perkawinan anak memperlihatkan empat argumentasi utama Magdalene dalam menentang praktik perkawinan anak:

1. Risiko Kesehatan
2. Siklus Kemiskinan
3. Pornografi Tidak Relevan
4. Kekerasan Institusional

Namun, dalam artikel-artikel Magdalene ditemukan pula jejak wacana dominan karena walau hegemoni total tidak akan pernah terjadi, resistansi efektif juga tidak pernah mudah, dan media yang memperlihatkan ideologi mereka secara terang-terangan pun bisa terperangkap dalam dominasi ideologi dominan dengan mengistimewakan (*privileging*) interpretasi atas kenyataan yang telah diterima atau dianggap normal (lihat Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015; Littlejohn dan Foss, 2008). Wacana-wacana dominan yang tanpa sadar dilanggengkan Magdalene adalah sebagai berikut.

1. Perempuan Tidak Berhak Mengatur Tubuh dan Hidupnya
2. Perempuan Harus Perawan, Kecuali Mereka Menikah
3. Pria Bekerja / Perempuan Menjadi Ibu

Magdalene adalah kontra-hegemoni dengan ideologi feminisme liberalnya – berupaya mendefinisikan ulang feminitas, mewacanakan kesetaraan gender, serta merepresentasikan perempuan sebagaimana adanya dan bukannya sebagai komoditas, objek seks, atau konsumen seperti representasi perempuan di media lain (lihat wawancara dengan Devi) – yang merepresentasikan perkawinan anak sebagai penindasan terhadap perempuan yang di antaranya dilakukan oleh institusi negara dan agama yang patriarkis, sehingga Undang-Undang Perkawinan dan cara pikir terhadap perempuan perlu diubah. Pemikiran tersebut senada dengan pandangan feminisme liberal bahwa anak belum bisa membuat keputusan rasional dan berdasarkan informasi lengkap, khususnya dalam konteks aktivitas seksual sehingga feminisme liberal menolak hubungan seksual yang melibatkan anak, termasuk perkawinan anak (lihat Jaggar, 1983).

Melalui wacana-wacana dalam artikel-artikel Magdalene tampak bahwa institusi agama, khususnya apa yang diterima sebagai ajaran Islam, memengaruhi apa yang kini dipersepsikan sebagai tradisi Indonesia karena Islam adalah agama mayoritas dan secara umum agama dipandang sebagai panduan dalam hidup di Indonesia yang nilai dan ajarannya bersifat mutlak atau harus dipatuhi tanpa dipertanyakan. Ideologi – sistem pemaknaan yang dipandang sebagai kebenaran universal, walau sebenarnya merupakan pemaknaan yang berasal dari sejarah tertentu yang mengaburkan dan melanggengkan kekuasaan (Barker, 2003, h. 10)

– ini lebih terartikulasi daripada ideologi yang menentangnya, tetapi hegemoni adalah kondisi sementara karena ideologi-ideologi selalu berjuang dan kontra-hegemoni bisa terjadi. Walau kebenaran atau pengetahuan, dalam perspektif Cultural Studies, adalah masalah posisi, yaitu tentang dari mana seseorang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa (Barker, 2003, h. 5).

## **5. 2 Saran**

### **5. 2. 1 Saran Akademik**

Peneliti menyarankan dilakukannya penelitian lain yang lebih mendalami cara-cara ideologi-ideologi dominan tanpa disadari dilanggengkan dalam wacana perkawinan anak dengan menganalisis pengaruh kekuasaan setiap institusi dalam membentuk *shared understanding*, misalnya dengan menganalisis mengapa di Indonesia wacana ajaran agama diterima tanpa dipertanyakan.

### **5. 2. 2 Saran Praktis**

Walaupun membangun argumentasi dalam wacana dominan mereproduksi ideologi-ideologi dominan, membangun argumentasi di luar hegemoni bisa berarti argumentasi itu tidak dipandang sebagai kebenaran. Penulis menyarankan pihak-pihak yang menentang perkawinan anak untuk memanfaatkan wacana dominan sekaligus mempertanyakannya dengan menguraikan ketidakwajaran pemikiran yang diterima sebagai kewajaran serta lebih mengartikulasikan referensi yang menentang wacana yang melegitimasi perkawinan anak, seperti buku *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan, Fikih Kawin Anak, Menguji Pasal Perkawinan*

*Usia Anak, Selamatkan Anak-anak Indonesia dari Perkawinan di Usia Anak, dan  
Panduan: Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam  
Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia Anak-Anak.*

